



Prospective Analysis of the Role of Actors in the Formulation Strategy for Fisheries Development in Purworejo Regency

Rahmania Mustahidda

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin

Maulana Ihsan Yusufi Suyatno

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin

Dhian Andanarini Minar Savitri

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin

Jl. Gedong Songo Raya No.12, Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang

rahmania@stietotalwin.ac.id

Abstrak.

The aim of this research is to find out how stakeholders participate in making fisheries development strategies in Purworejo.

This study was conducted from January to April 2024 in Purworejo Regency. Mactor analysis is an analytical approach that provides various tools and analyzes that are useful for obtaining information and combining situations from several simple inputs about the problem being analyzed. All parties involved in developing the fisheries sector in Purworejo Regency. Data was obtained through interviews and focused discussions.

Stakeholders with high role and influence and low dependency (located in quadrant I or top left). These factors are the main actors in the fisheries business in Purworejo Regency. Some of the stakeholders in quadrant II are actors who have significant influence but are also very dependent on them. To increase influence and reduce dependence on stakeholders in quadrants III and IV.

Keywords: *Dependency; mactor; Purworejo; Stakeholders; actor*

Abstrak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemangku kepentingan berpartisipasi dalam pembuatan strategi pembangunan perikanan di Purworejo.

Studi ini dilakukan dari Januari hingga April 2024 di Kabupaten Purworejo. Analisis Mactor adalah pendekatan analisis yang menyediakan berbagai alat dan analisis yang berguna untuk mendapatkan informasi dan menggabungkan situasi dari beberapa masukan sederhana tentang masalah yang sedang dianalisis. Semua pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Purworejo. Data diperoleh melalui wawancara dan diskusi terfokus.

Stakeholder dengan peran dan pengaruh yang tinggi dan ketergantungan yang rendah (terletak di kuadran I atau kiri atas). Faktor tersebut merupakan pelaku utama dalam usaha perikanan di Kabupaten Purworejo. Sebagian dari stakeholder di kuadran II adalah aktor yang memiliki pengaruh yang signifikan tetapi juga sangat tergantung pada mereka. Untuk meningkatkan pengaruh dan mengurangi ketergantungan stakeholder yang berada di kuadran III dan IV.

Kata Kunci: *ketergantungan; mactor; Purworejo; Stakeholder; aktor*

PENDAHULUAN

Jenis pembangunan daerah ditentukan oleh "mekanisme pasar" karena pendekatan perencanaan pembangunan yang cenderung berorientasi sektoral dan tidak mempertimbangkan dimensi spasial. Dengan demikian, modal dan individu lebih cenderung memilih tempat yang menawarkan return yang lebih tinggi dan menarik.

Karena lokasinya di pesisir, Kabupaten Purworejo tidak menarik investor. Seiring dengan penurunan peran dan pertumbuhan sektor pertanian, sumber pertumbuhan baru harus dicari untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Purworejo. Dengan demikian, sektor pertanian saat ini mendominasi ekonomi Kabupaten Purworejo sebesar 80%, dengan sektor perikanan baru mencapai 20% (BPS Kabupaten Purworejo, 2023).

Akibatnya, pembangunan ekonomi di wilayah yang bergantung pada perikanan di Kabupaten Purworejo harus diberi prioritas sehingga sektor ini dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi setelah peran pertanian berkurang.

Produksi perikanan tangkap laut Samudra Hindia cenderung meningkat, terutama pada tahun 2023, dengan peran produksi ikan Kabupaten Purworejo sebesar 21.48% dari produksi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Namun demikian, rata-rata pengembangan sumber daya perikanan di WPP-RI 711 mengalami penurunan, bahkan ketika terjadi overfishing untuk ikan pelagis kecil dan crustacea. Akibatnya, untuk meningkatkan daya saing di wilayah perbatasan dan tertinggal Kabupaten Purworejo, penting untuk mengoptimalkan potensi lokal untuk membangun industri perikanan yang unggul dengan basis produksi dan distribusi.

Untuk mempercepat industrialisasi perikanan di Purworejo, ada beberapa hal yang mendukung: (i) potensi perikanan pelagis dan demersal; (ii) peluang pemasaran untuk ekspor ikan demersal hidup dan segar; (iii) batasan langsung dengan negara tetangga yang memungkinkan ekspor; dan (iv) peluang perdagangan antar provinsi. Namun, ada beberapa hambatan untuk meningkatkan peran perikanan dalam ekonomi Purworejo. Ini termasuk potensi sumber daya, armada penangkapan ikan, alat tangkap, infrastruktur pendukung, daya serap pasar lokal, dan orientasi pasar.

Situs geografis Kabupaten Purworejo yang terpencil dan terluar dengan banyak pulau menyebabkan masalah dalam sistem distribusi dan transportasi. Salah satu program pemerintah yang dikenal sebagai kapal tol laut diharapkan dapat mengurangi biaya transportasi antar wilayah, terutama untuk membawa hasil dari Purworejo ke pasar dan memberikan produk yang dibutuhkan masyarakat Purworejo. Kapal antar pulau melayani moda transportasi laut. Kapasitas dan frekuensi moda transportasi yang terbatas menyebabkan biaya distribusi yang mahal dan produk tidak dapat dipasarkan tepat waktu.

Menurut Fauzi (2020), pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana tujuan keberlanjutan dicapai. Mereka juga bertanggung jawab untuk menentukan metrik yang menjadi pijakan keberlanjutan. Metode Mactor telah digunakan secara luas untuk melakukan analisis keberlanjutan. Beberapa penelitian yang menggunakan metode Mactor termasuk: Abdelrahim (2009) menganalisis keberlanjutan wilayah padang pasir Mesir; Jaziri & Bousafa (2010) menganalisis keberlanjutan pariwisata Tunisia; dan Stamatelatos & Ballon (2011) menganalisis keberlanjutan bisnis dalam jaringan energi. Dalam tahun 2019, Fauzi melakukan analisis kebijakan tentang pelarangan alat tangkap Cantrang dengan menggunakan teknik analisis Mactor.

Metode Analisis Struktural Prospektif (PSA) memungkinkan untuk melihat bagaimana variabel berhubungan dan berdampak satu sama lain. Ini memungkinkan untuk mengklasifikasikan variabel untuk mengetahui variabel mana yang paling relevan untuk strategi pengembangan pembangunan Purworejo yang berbasis sumber daya perikanan. Dalam industri hilir produk olahan, analisis Mactor digunakan untuk menggambarkan sinergitas antara berbagai pihak dan elemen yang terlibat dalam penerapan kebijakan pengembangan klusterisasi (Anonim,

2017). Agar sektor perikanan dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pembangunan wilayah di Kabupaten Purworejo, diperlukan kerja sama yang efektif antara pelaku dan stakeholder utama dalam pembangunan sektor tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran yang dimainkan oleh pemangku kepentingan, juga dikenal sebagai stakeholder, dalam pembentukan strategi pembangunan perikanan di wilayah Kabupaten Purworejo.

KAJIAN TEORI

Kebijakan

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, keputusan, sikap, dan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Untuk mencapai tujuannya, organisasi harus menetapkan kebijakan. Kebijakan memiliki dua komponen:

- a. Kebijakan adalah praktik sosial, bukan peristiwa tunggal atau terpisah. Oleh karena itu, kebijakan adalah sesuatu yang dibuat oleh pemerintah dan didasarkan pada segala hal yang terjadi di masyarakat. Ini tumbuh dari praktik kehidupan masyarakat, bukan dari peristiwa yang terisolasi, terpisah, atau asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah reaksi terhadap kejadian. Tujuannya adalah untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik bekerja sama dan mendorong mereka untuk bekerja sama jika mereka diperlakukan secara tidak rasional.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu atau sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan biasanya bersifat mendasar karena hanya memberikan pedoman umum untuk bertindak dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku dan terdiri dari serangkaian program, aktivitas, dan tindakan yang dirancang untuk memecahkan masalah tertentu. Para pelaku mengikuti dan melaksanakan kebijakan ini untuk memecahkan masalah tersebut.

Implementasi kebijakan

Satu dari banyak tahap kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah variabel terpenting yang memengaruhi keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian masalah publik. Ini mencakup bagaimana implementasi dilihat sebagai alat administrasi hukum dan juga sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan.

Untuk menyelesaikan masalah masyarakat, kebijakan publik dibuat. Para pihak, terutama pemerintah, menetapkan kebijakan publik yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan publik berarti hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan atau sasaran melalui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan diketahui setelah kebijakan tersebut diterapkan, dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat diukur dari dampak evaluasi yang dilakukan atas pelaksanaan kebijakan publik. Secara sederhana, "pelaksanaan kebijakan" adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan dilakukan dengan teliti berdasarkan standar tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Banyak orang percaya bahwa kunci untuk menyelesaikan masalah dan konflik di wilayah pantai yang sangat pelik dan kompleks adalah pengelolaan wilayah pantai yang terintegrasi. Dalam manajemen publik, keterpaduan berarti mencapai tujuan dan tujuan secara bersamaan, mengumpulkan dan menganalisis data secara bersamaan, dan menggunakan instrumen dan perangkat pengelolaan secara bersamaan. Pada kenyataannya, integrasi ideal yang disebutkan di atas tidak pernah akan terjadi atau dilakukan. Praktek integritasi ini biasanya mencakup kerja sama antara berbagai lembaga yang saling terkait untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, prioritas, dan tindakan.

Mekanisme, prosedur, dan rencana dapat digunakan untuk mencapai upaya koordinasi ini. Dengan demikian, rencana wilayah pantai terpadu berfungsi sebagai instrumen koordinasi selain memberikan arahan tentang pengembangan, strategi yang dilakukan, dan tindakan yang akan dilakukan. Ada banyak cara untuk memahami pengembangan wilayah, dan tergantung pada kondisi wilayah pesisir yang bersangkutan, selalu ada masalah yang paling penting. Metode ini mencakup: a. Pendekatan ekologis; b. Pendekatan fungsional atau ekonomi; c. Pendekatan sosio-politik; d. Pendekatan tindakan dan kultural; dan e. Pendekatan ekologis menekankan pada ruang wilayah sebagai bagian dari ekosistem.

Untuk menyelidiki dampak pembangunan secara ekologis, metode ini sangat efektif; namun, ada kecenderungan untuk mengabaikan aspek sosial, ekonomis, dan politis dari ruang wilayah. Pendekatan fungsional ekonomi menekankan pada ruang wilayah sebagai wadah fungsional untuk berbagai kegiatan, di mana faktor jarak atau lokasi menjadi penting; dan pendekatan sosial politis menekankan aspek "penguasaan" wilayah.

Konflik—konflik terjadi antara kelompok. Metode ini juga menganggap wilayah sebagai teritorial, yang berarti bahwa bagian-bagian wilayah tertentu terhubung dengan satuan organisasi tertentu. Metode tindakan dan kultural, menekankan hubungan antara wilayah dengan individu dan masyarakat yang tinggal atau memanfaatkannya. Metode ini menekankan pentingnya memahami bagaimana masyarakat dan perilaku manusia terlibat dalam pengembangan wilayah. Metode ini mempertimbangkan bahwa berbagai elemen norma, kultur, dan psikologi masyarakat akan menghasilkan pemahaman yang berbeda tentang area tertentu. Ada sejumlah metode yang lebih instrumental daripada yang substansial, seperti yang disebutkan sebelumnya.

Pengelolaan sumber daya pesisir secara terpadu adalah proses iteratif dan evolusioner yang bertujuan untuk mencapai pembangunan pesisir yang optimal dan berkelanjutan. Tujuan akhir dari ICZM bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek; itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara adil dan proporsional oleh semua pihak yang terlibat, serta mempertahankan daya dukung dan kualitas lingkungan pesisir, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara lestari. Keterpaduan (integrasi) dan koordinasi adalah komponen penting dari ICZM untuk mencapai tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dari Januari hingga April 2024. Perikanan memiliki potensi untuk berkembang di Kabupaten Purworejo

karena merupakan daerah pesisir, dan akan memiliki pengaruh yang lebih besar pada pembangunan daerah tersebut. Saat penelitian ini dilakukan, Kabupaten Purworejo memiliki program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), yang mencakup semua wilayah yang terkait dengan program tersebut. Meskipun perikanan memiliki potensi yang besar, keterpaduan antar pemangku kepentingan dan aktor yang terlibat dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Purworejo diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan analisis peran aktor dan faktor yang terlibat dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Purworejo.

Jenis dan Metode Pengambilan Data

Penelitian menggunakan data primer dan skunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner terstruktur, sedangkan data skunder berasal dari hasil publikasi pemerintah atau penelitian terdahulu. Dimulai dengan diskusi kelompok terfokus atau diskusi kelompok terfokus (FGD). Hasil dari diskusi FGD digunakan sebagai bahan analisis dengan menggunakan alat analisis Mactor, yang digunakan sebagai acuan untuk membuat rencana kebijakan yang akan diusulkan.

Metode Analisis

Aktor sangat penting dalam proses pemikiran skenario strategi prospektif. Analisis prospektif digunakan untuk menilai konvergensi dan divergensi, memperkirakan koalisi dan konflik, dan menilai posisi para pemangku kepentingan pada berbagai masalah strategis. Pembuat kebijakan harus mengantisipasi penggerak penting di masa depan yang dapat mempengaruhi variabel penting dalam jangka panjang.

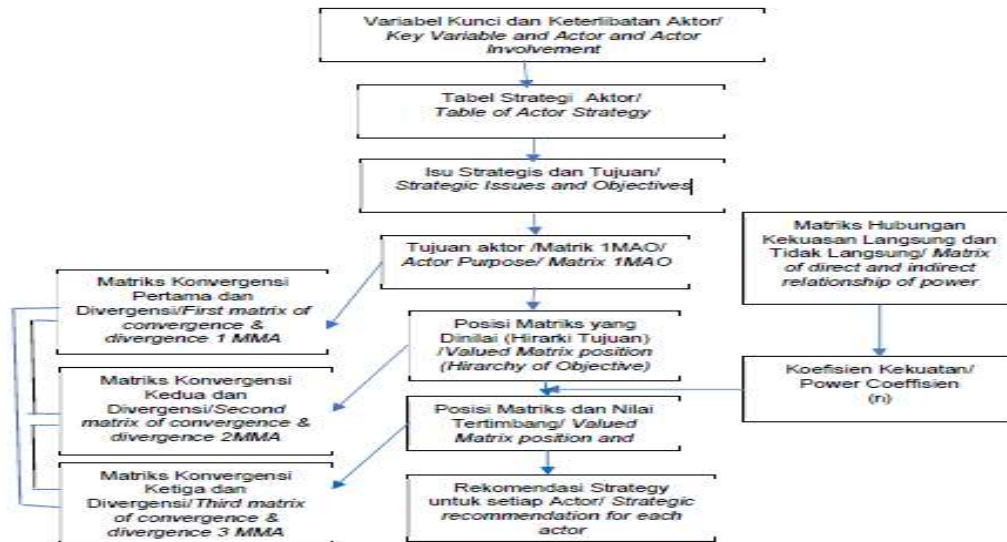
Metode analisis prospektif berasal dari "la prospektif", terutama metodologi perencanaan skenario formal. Metode Mactor diciptakan sebagai tanggapan atas kritik yang meningkat yang dihasilkan dari teknik peramalan tradisional yang berbasis ekstrapolasi. Godet (2000) berkontribusi pada pengembangan metode dan prosedur Mactor dan Micmac untuk digunakan dalam analisis skenario.

Faktor-faktor yang menentukan sektor energi nuklir Perancis telah diidentifikasi melalui penggunaan analisis struktural. Selain itu, sarjana futuris Iran telah banyak menggunakan analisis struktural untuk membuat skenario untuk roadmap ilmu pengetahuan dan teknologi negara mereka. Metodologi aktor multi-corak formal yang dimaksudkan untuk mengevaluasi dampak strategi pelaku terhadap lingkungan Metode Mactor—Matriks Aliansi dan Konflik: Taktik, Tujuan, dan Rekomendasi—didasarkan pada pengaruh antar-pelaku dan memanfaatkan nilai tambah informasi yang terkandung dalam tabel strategi para pelaku.

Metode Mactor berusaha untuk memberi gambaran luas tentang pentingnya dan hasil dari berbagai masalah, serta strategi yang diharapkan dari aktor, hubungan kekuatan, dan kemungkinan koalisi dan konflik. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan kemungkinan evolusi sistem yang sedang dipelajari untuk membangun skenario yang lebih baik dan lebih konsisten.

Metode Mactor digunakan untuk melihat preferensi masing-masing pemangku kepentingan dan tingkat dukungan mereka untuk tujuan yang telah ditentukan. Metode ini juga menentukan tingkat dukungan yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan untuk setiap tujuan dan kelompok. Kerangka yang dibuat oleh Godet (1991) biasanya digunakan untuk analisis mactor.

Metode Mactor diterapkan pada berbagai situasi yang melibatkan banyak aktor dan masalah, seperti membantu pengambil keputusan memilih antara opsi strategis. Masalah pengelolaan sumber daya ikan, peran tauke yang relatif dominan, penciptaan SKPT, peran Perindo, dan hubungan antar stakeholder di daerah, propinsi, dan pusat yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan di Kabupaten Purworejo adalah beberapa masalah yang berkembang.



Proses analisis struktural terdiri dari tiga tahap: pertama, mengumpulkan inventaris atau daftar variabel; kedua, membangun jaringan interelasi; dan ketiga, menemukan faktor kunci. Hasil analisis menggunakan metode Mactor mencakup: (i). membuat keputusan tentang apa yang akan dianalisis; (ii) melakukan diskusi fokus grup (FGD) dengan para pelaku utama (nelayan, pedagang besar dan pedagang kecil, pengurus KUB, pengurus koperasi, pengelola SKPT, pengolah produk, dan perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Purworejo, DJPT, Perwakilan Bappeda Kabupaten Purworejo, dan koperasi) atau melakukan wawancara terstruktur. Setelah tahap ini selesai, tabel untuk analisis diisi dengan tabel matriks pengaruh langsung / MDI dan Tabel Aktor-Tujuan / 2MAO. Faktor-faktor yang terlibat dalam analisis struktural prospekti (PSA) yang dilakukan dengan Mactor adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perikanan Kabupaten Natuna (DKP Purworejo)
2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)
3. Tauke/Pedagang besar
4. Penyedia ES
5. Industri Pengolahan (Pengolahan)
6. Nelayan Lokal (Nelayan)
7. Pengelola SKPT Purworejo
8. Kelompok Usaha Bersama (KUB)
9. Koperasi (Koperasi)
10. Perbankan (BSI)
11. Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo)
12. Penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM)
13. Perbekalan Melaut (Perbekalan)
14. Penyuluh Perikanan/Pendamping LPMUK (Penyuluh)
15. Pengawas PSDKP (Pengawas)
16. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Namun, tujuan analisis mactor adalah

1. Produksi Perikanan (Produksi)
2. Pendapatan Pelaku (Pendapatan)
3. Kesempatan Kerja (KERJA)
4. Nilai Ekspor (Ekspor)
5. Kredit yang disalurkan (Kredit)
6. Konservasi (Kons)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Analisis Prospektif dengan Metode Mactor

Dari beberapa masukan sederhana tentang peran aktor dalam pemecahan masalah, Mactor menyediakan berbagai alat dan analisis yang berguna untuk mendapatkan gambaran situasi yang menyeluruh dan agregat. Analisis stakeholder sangat penting untuk menentukan strategi perumusan kebijakan pengembangan pulau terluar, khususnya di Kabupaten Purworejo. Analisis ini penting untuk memahami peran dan hubungan antar aktor dan stakeholder serta untuk mengetahui bagaimana stakeholder bersikap terhadap berbagai tujuan pengembangan pulau terluar di Kabupaten Purworejo. Membangun matrik pengaruh langsung (MDI) dan matrik tujuan aktor (MAO) adalah langkah pertama dalam analisis Mactor. Matrik MDI menunjukkan pengaruh antar aktor terhadap aktor lainnya dengan skor 0–4, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan pengaruhnya. Sementara itu, matrik MAO menunjukkan sikap aktor terhadap tujuan.

Koefisien agregat dan berbagai representasi grafis yang disediakan oleh metode Mactor membantu dalam interpretasi data yang dihitung dengan model. Semua aktor ditempatkan sesuai dengan pengaruh global atau pengaruh (ordinat) dan ketergantungan atau ketergantungan (absis) dalam bagan pengaruh dan ketergantungan dua dimensi.

Tabel 1. Matrik MDI

| No | MDI | DKP Natural/ RFS | DJPT/ DGCF | Taukel/ Wholesaler | Es/Ice | Pengolahan/ Processing | Nelayan/ Fishers | SKPT Natural/ ICMF | KUB/ JBG | Koperasi/ Cooperative | Bank/ Bank | Perindo/ Perindo | BBM/ Fuel | Perbekalan/ Supplier | Penyuluh/ Extension | Pengawas/ Supervision | PLN/ Electricity |
|----|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | DKP/RFS | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | DJPT/DGCF | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Taukel/Wholesaler | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Es/Ice | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Pengolahan/Processing | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Nelayan/Fishers | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | SKPT/ICMF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | KUB/JBG | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | Koperasi/Cooperative | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Bank/Bank | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Perindo/Perindo | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | BBM/Fuel | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Perbekalan/Supplier | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Penyuluh/Extension | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Pengawas/Supervision | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | PLN/Electricity | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |

Matrik MDI yang ditemukan pada tabel 1 adalah matrik yang mengisi hasil fokus kelompok fokus (FGD) dan hasil wawancara atau pengumpulan data. Matrik dibaca dari satu baris ke satu kolom. Sebagai contoh, kondisi lapangan menunjukkan bahwa peran nelayan sangat menentukan keberadaan KUB dan Perindo. KUB sebagai wadah usaha nelayan tentu sangat memerlukan peranan nelayan agar usaha mereka dapat berjalan lancar, dan Perindo juga sangat memerlukan kehadiran nelayan sebagai sumber memperoleh ikan untuk diproses selanjutnya. Oleh karena itu, baris nelayan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KUB dan Perindo.

Tabel 2. Matrik 2MAO

| No | 2MAO | Produksi/ Production | Pendapatan/ Revenue | Kerja/ Work | Eksport/ Export | Kredit/ Credit | Konservasi/ Conservation |
|----|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | DKP Natuna/RFS | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | DJPT/DGCF | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Tauke/Wholesaler | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| 4 | Es/Ice | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | -2 |
| 5 | Pengolahan/ Processing | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 |
| 6 | Nelayan/Fishers | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -2 |
| 7 | SKPT Natuna/ICMF | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | KUB/JBG | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 9 | Koperasi/Coperative | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Bank/Bank | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Perindo/Perindo | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | -3 |
| 12 | BBM/Fuel | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -3 |
| 13 | Perbekalan/Supplier | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 14 | Penyuluh/Extention | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | Pengawas/Supervision | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 16 | PLN/Electricity | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Matrik 2MAO menggambarkan hubungan antara pemangku kepentingan dan tujuan yang akan dicapai. Tabel 2 menunjukkan hubungan antara stakeholder dan tujuan program pembangunan Kabupaten Purworejo. Nilai positif yang lebih tinggi menunjukkan bahwa aktor setuju dengan tujuan program. Sebagai contoh, aktor nelayan menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tujuan produksi dan pendapatan, tetapi mereka tidak setuju dengan tujuan konservasi program. Aktor nelayan, tauke, penyedia es, pengolah, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo), penyedia BBM, dan perbekalan menentang atau tidak menyetujui rencana program konservasi. Pihak berwenang pemerintah biasanya lebih halus dan lebih "konservatif" terhadap semua tujuan program.

2. Tingkat Pengaruh dan Ketergantungan Antar Aktor

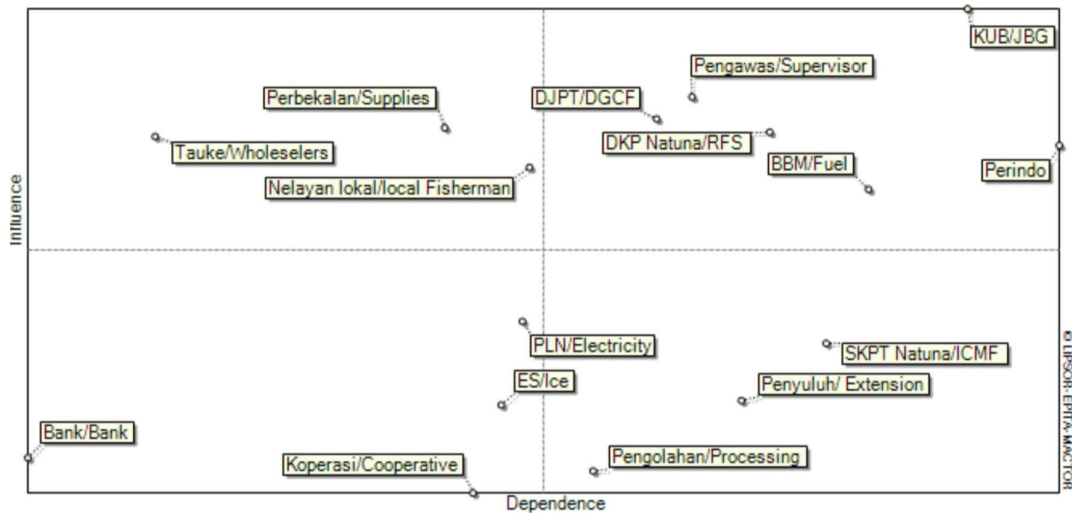
Tabel 3. Tingkat Pengaruh dan Ketergantungan Langsung dan Tidak Langsung Antar Aktor

| No. | MDII | DKP Natuna/ RFS | DJPT/DGCF | Tauke/ Wholesaler | Es/Ice | Pengolahan/ Processing | Nelayan/ Fishers | SKPT Natuna/ ICMF | KUB/ JBG | Koperasi/ Coperative | Bank/ Bank | Perindo/ Perindo | BBM/ Fuel | Perbekalan/ Supplier | Penyuluh/ Extention | Pengawas/ Supervision | PLN/ Electricity | Di |
|-----|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------|
| 1 | DKP/RFS | 27 | 26 | 21 | 24 | 26 | 26 | 27 | 31 | 23 | 20 | 32 | 29 | 24 | 28 | 26 | 24 | 387 |
| 2 | DJPT/DGCF | 26 | 27 | 20 | 24 | 26 | 24 | 30 | 31 | 24 | 19 | 33 | 30 | 23 | 28 | 27 | 25 | 390 |
| 3 | Tauke/ Wholesaler | 26 | 28 | 20 | 24 | 24 | 24 | 28 | 29 | 24 | 20 | 29 | 28 | 25 | 26 | 27 | 24 | 386 |
| 4 | Es/Ice | 24 | 24 | 18 | 21 | 19 | 21 | 25 | 24 | 21 | 18 | 25 | 23 | 20 | 20 | 22 | 21 | 325 |
| 5 | Pengolahan/ Processing | 22 | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 16 | 24 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 310 |
| 6 | Nelayan/ Fishers | 26 | 26 | 20 | 23 | 25 | 25 | 27 | 30 | 23 | 20 | 29 | 29 | 23 | 28 | 26 | 24 | 379 |
| 7 | SKPT/ICMF | 25 | 22 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 26 | 22 | 18 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 339 |
| 8 | KUB/JBG | 30 | 28 | 21 | 26 | 28 | 27 | 31 | 34 | 25 | 20 | 37 | 32 | 25 | 30 | 29 | 26 | 415 |
| 9 | Koperasi/ Coperative | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 16 | 22 | 22 | 19 | 22 | 21 | 21 | 305 |
| 10 | Bank/Bank | 23 | 19 | 17 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 17 | 25 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 313 |
| 11 | Perindo/ Perindo | 25 | 27 | 20 | 24 | 26 | 26 | 27 | 31 | 24 | 20 | 30 | 30 | 24 | 28 | 27 | 25 | 384 |
| 12 | BBM/ Fuel | 27 | 26 | 21 | 24 | 24 | 24 | 28 | 29 | 24 | 18 | 29 | 29 | 24 | 26 | 26 | 24 | 374 |
| 13 | Perbekalan/ Supplier | 28 | 27 | 20 | 25 | 25 | 25 | 26 | 31 | 25 | 19 | 31 | 29 | 23 | 26 | 26 | 25 | 388 |
| 14 | Penyuluh/ Extention | 25 | 22 | 19 | 20 | 23 | 20 | 23 | 25 | 20 | 16 | 25 | 23 | 20 | 24 | 24 | 21 | 326 |
| 15 | Pengawas/ Supervision | 29 | 27 | 21 | 27 | 26 | 25 | 27 | 31 | 25 | 19 | 31 | 30 | 24 | 28 | 28 | 25 | 395 |
| 16 | PLN/ Electricity | 25 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 21 | 18 | 26 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 344 |
| | Di | 382 | 366 | 295 | 344 | 357 | 348 | 390 | 410 | 340 | 277 | 423 | 396 | 336 | 378 | 371 | 347 | 5760 |

Berdasarkan pada tabel 3 menunjukkan pengaruh bersih langsung dan tidak langsung (Li), sedangkan Di menunjukkan tingkat pengaruh ketergantungan bersih langsung dan tidak langsung. Di kabupaten Purworejo, tauke atau pedagang besar adalah aktor utama dalam kegiatan

perikanan. Ada pengaruh langsung dan tidak langsung yang tinggi ($I_i=386$), dan ketergantungan mereka rendah ($D_i=295$). Dalam sistem perikanan Kabupaten Purworejo, tauke adalah aktor utama. Tauke memainkan peran penting dalam perdagangan ikan, memberikan modal, membantu kapal dan alat tangkap, dan menetapkan harga. Pengelola SKPT, LPMUKP, Perbekalan, KUB, DKP Kabupaten Purworejo, DJPT, Perindo, dan PSDKP.

Gambar 1. Pemetaan Peran Aktor dalam Kuadran
Map of influences and dependences between actors



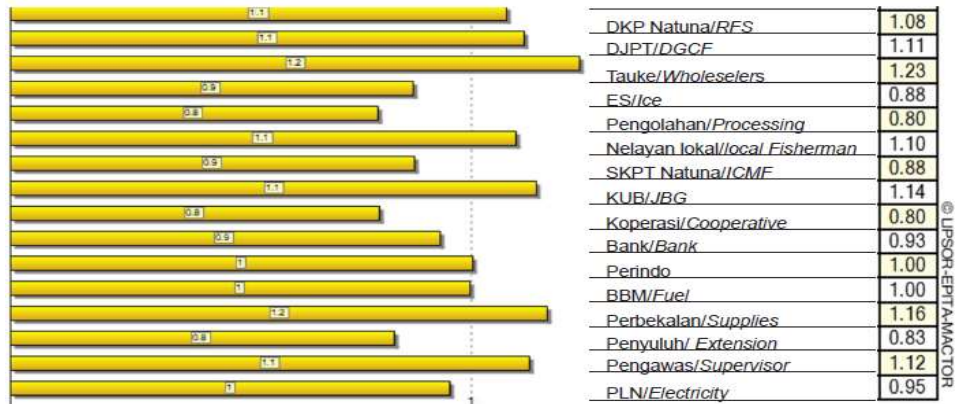
Pada gambar 1 memberikan pemahaman awal tentang kepentingan relatif aktor yang berbeda. Ini membedakan aktor dominan, yang memiliki pengaruh tinggi, dan aktor yang didominasi, yang memiliki pengaruh rendah, dan aktor relay, yang memiliki pengaruh dan ketergantungan tinggi. Dalam situasi seperti ini, kekuatan aktor dapat dibandingkan dengan menggunakan kekuatan relatif untuk menentukan aktor yang paling berpengaruh. Mobilisasi tidak hanya menunjukkan kekuatan aktor terhadap masalah, tetapi juga menunjukkan kesediaan untuk mengendalikannya. Gagasan bagan menunjukkan mobilisasi aktor total untuk setiap masalah. Tempat masing-masing aktor atau pelaku dalam kuadran menunjukkan kekuatan pengaruh mereka dan tingkat ketergantungan mereka.

Keberlanjutan program atau sistem ditentukan oleh stakeholder. Peta pengaruh (influence) dan ketergantungan membantu memahami bagaimana interaksi antar aktor mencapai tujuan dan bagaimana memobilisasi aktor untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, menunjukkan kekuatan kontrol dan ketergantungan aktor dalam pembangunan Natuna. Aktor yang berada di posisi atas memiliki pengaruh yang lebih besar, sedangkan aktor yang berada di sebelah kanan memiliki ketergantungan yang lebih besar.

Aktor-aktor yang berada di kuadran I/Kiri Atas, seperti pedagang, petani, perbekalan, dan nelayan, memiliki peranan dan pengaruh yang tinggi dan memiliki ketergantungan yang rendah. Sebaliknya, aktor-aktor yang berada di kuadran III (kanan bawah), seperti pengolah, penyuluh, dan pengelola SKPT Purworejo, memiliki ketergantungan yang tinggi dan pengaruh yang sangat kecil. Aktor-aktor yang berada di kuadran 4 (kiri bawah), seperti perbankan. Aktor-aktor di kuadran II memiliki pengaruh yang besar dan ketergantungan yang besar. Mereka adalah KUB, Perindo, DJPT, Pengawas, DKP Natuna, dan Penyedia BBM.

Gambar 2. Diagram Daya Saing Aktor Dalam Pembangunan Perikanan di Kabupaten Natuna

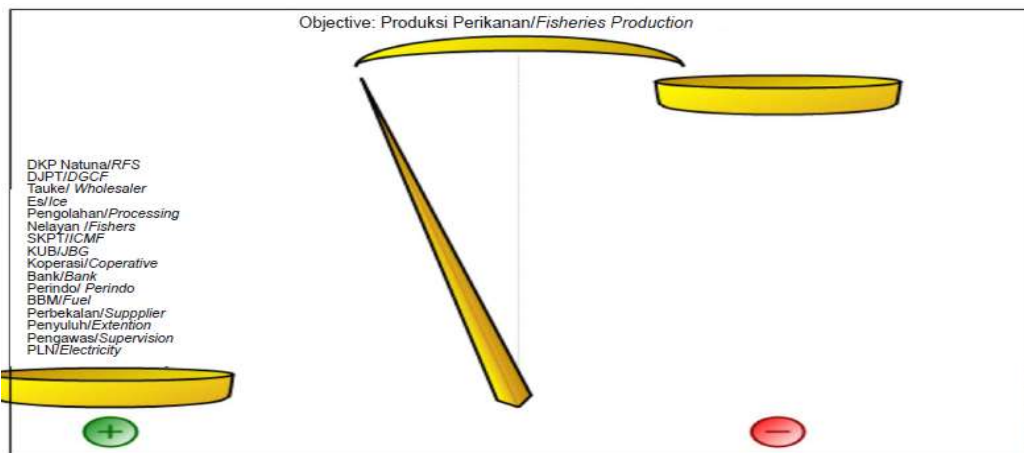


Daya saing aktor digambarkan pada Gambar 2. Ini didasarkan pada tingkat pengaruh langsung dan tidak langsung aktor terhadap aktor lain. Gambar 2 menunjukkan persaingan antara aktor yang berperan sebagai penyuluh perikanan, nelayan lokal, koperasi, penyedia BBM, pedagang besar (tauke), pedagang, dan penyedia perbekalan. Pengaruh langsung dan tidak langsung aktor terhadap aktor lainnya ditunjukkan. Pedagang besar (tauke), penyedia perbekalan, KUB, dan pengawas ing rendah adalah koperasi, perbankan, penyuluh perikanan, PLN, pengolahan, dan penyedia es.

Aktor dengan nilai lebih dari 1 seratus persen (seratus persen) memiliki daya saing yang tinggi, sementara aktor dengan nilai kurang dari 100 memiliki daya saing yang rendah, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

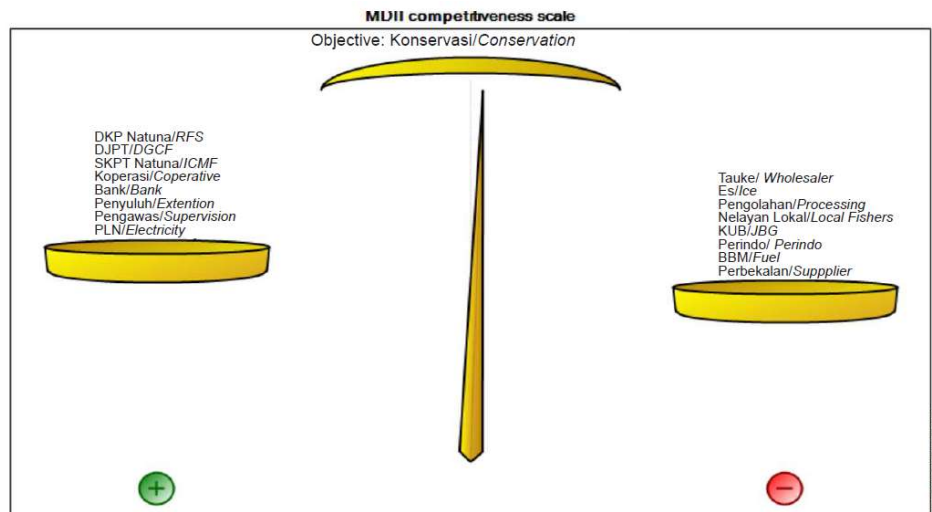
3. Konvergensi dan Divergensi Antar Aktor

Gambar 3. Timbangan antara Aktor dan Tujuan Konvergensi dan Divergensi antar Stakeholder



Hasil analisis Mactor, yang melakukan "timbangan" untuk setiap tujuan, ditunjukkan pada Gambar 3. Ada enam tujuan analisis: produksi perikanan (produksi); pendapatan pelaku (pendapatan); kesempatan kerja (pekerjaan); nilai ekspor (ekspor); kredit diberikan (kredit); dan konservasi (kons). Tujuan dari nomor 1-5 adalah tujuan yang memiliki arah yang sama, dengan masing-masing menunjukkan arah timbangan + (positif), yang berarti membantu tujuan tersebut. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Purworejo memiliki peluang untuk berkembang menjadi bisnis yang lebih kuat, sehingga dapat meningkatkan ekonomi Kabupaten Purworejo. Diharapkan UMKM di bidang perikanan dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo.

Gambar 4. Timbangan antara Aktor dan Tujuan Konservasi Antar Stakeholder



Aktor yang setuju dan tidak setuju dengan tujuan konservasi ditunjukkan dalam "timbangan" di Gambar 4. Aktor/stakeholder yang mendukung tujuan konservasi berada pada "timbangan" tanda + (positif), dan "timbangan" tanda – (negatif).

Analisis "timbangan" untuk koneservasi pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak setuju dengan tujuan konsevasi. Stakeholder pelaku usaha biasanya berusaha untuk mencapai tujuan keuntungan atau keuntungan. Stakeholder seperti tauke, penyedia es, pengolahan produk, nelayan, kelompok usaha bersama (KUB), perusahaan umum perikanan Indonesia (Perindo), penyedia bahan bakar minyak (BBM), dan penyedia perbekalan tidak setuju atau tidak setuju dengan tujuan konservasi. Namun, pihak-pihak yang mendukung tujuan konservasi termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Natuna; Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT); SKPT Natuna; Koperasi; Penyuluh; Pengawas; dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Bahkan jika ada insentif jangka pendek untuk bertindak secara oportunistik, aktor diharapkan tidak akan melakukannya, karena mereka dapat membantu stabilitas dalam jangka panjang. Untuk mendorong industrialisasi perikanan di Purworejo, ada enam faktor utama yang perlu diperhatikan. Faktor pertama adalah hubungannya dengan sumber daya perikanan di wilayah tersebut; kedua adalah sistem usaha, bisnis, dan pemasaran; ketiga adalah pembentukan lembaga ekonomi SKPT; keempat adalah peraturan dan harmonisasi aturan; kelima adalah permodalan; dan ke enam adalah pengembangan fungsi SKPT.

Tabel 4. Analisis 1 MAO (Aktor-Tujuan)

| No | ZMAO | Produksi/ Production | Pendapatan/ Revenue | Kerja/ Work | Eksport/ Export | Kredit/ Credit | Konservasi/ Conservation | Absolute Sum |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | DKP/RFS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 |
| 2 | DJPT/DGCF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | Tauke/Wholesaler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 4 | Es/Ice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 5 | Pengolahan/ Processing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 6 | Nelayan/Fishers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 7 | SKPT Natuna/ICMF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 |
| 8 | KUB/JBG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 9 | Koperasi/Coperative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 |
| 10 | Bank/Bank | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 |
| 11 | Perindo/Perindo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 12 | BBM/Fuel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 13 | Perbekalan/Supplier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 14 | Penyuluh/Extention | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 |
| 15 | Pengawas/Supervision | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 |
| 16 | PLN/Electricity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 |
| Jumlah yang setuju/Number of Agreement | | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | -8 | |
| Jumlah Tidak Setuju/Number of disagreement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| No Posisi/Number of Positions | | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 16 | |

Hasil analisis 1 di tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha (produsen es, pengolahan produk, nelayan, KUB, Perindo, BBM, dan penyedia perbekalan) tidak setuju dengan tujuan koneksi, yang ditandai dengan nilai -1 (upaya pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk keberlanjutan).

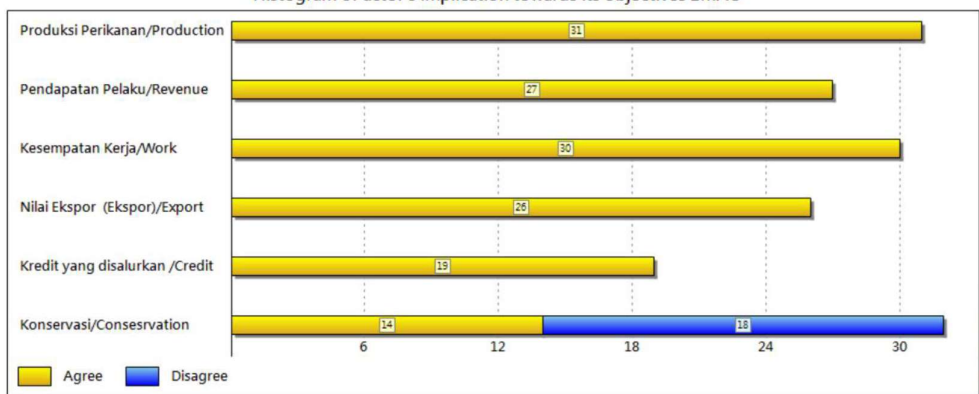
Aktor tersebut setuju dengan tujuan yang bernilai ekonomi, yaitu peningkatan produksi, pendapatan, kesempatan kerja, ekspor, dan kredit. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha tersebut tidak terlalu peduli dengan tujuan keberlanjutan daripada mencapai tujuan ekonomi. Agar tujuan ekonomi dapat dicapai bersamaan dengan tujuan keberlanjutan, pemerintah harus memperhatikan hal ini.

Ketidaksepakatan pelaku usaha tentang tujuan konservasi menunjukkan bahwa lebih banyak orang perlu sosialisasi dan belajar tentang upaya konservasi untuk menjaga kelangsungan usaha. Pemerintah telah melarang penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya agar bisnis tetap bertahan.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut didorong oleh pendapatan usaha perikanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, ekonomi akan tumbuh lebih cepat dan lebih besar. Namun, untuk menjaga keberlanjutan sektor perikanan, tujuan ekonomi (seperti pertumbuhan, pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan PDRD) harus diimbangi dengan tujuan konservasi.

4. Interaksi Aktor dan Tujuan Pembangunan Perikanan

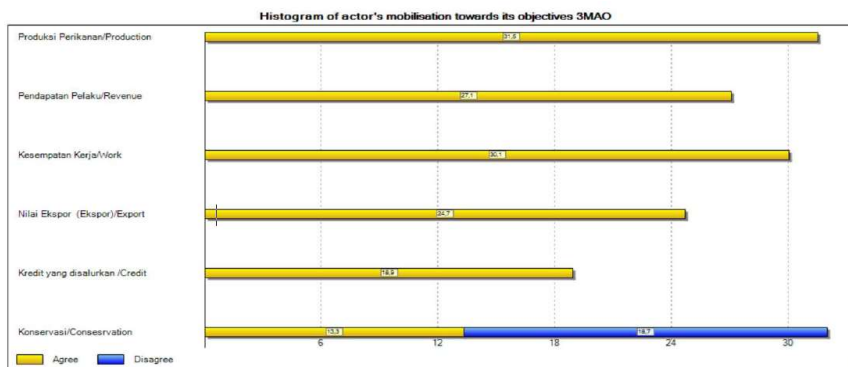
Histogram of actor's implication towards its objectives 2MAO



Gambar 5. Histogram Pencapaian Tujuan (2MAO)

Gambar 5 menunjukkan histogram, yang menjelaskan matriks hubungan bernilai/2MAO antara aktor dan tujuan. Histogram ini menunjukkan mobilisasi tujuan aktor dan posisinya terhadap tujuan yang ditetapkan.

Gambar 6. Histogram Pencapaian Tujuan (3MAO)

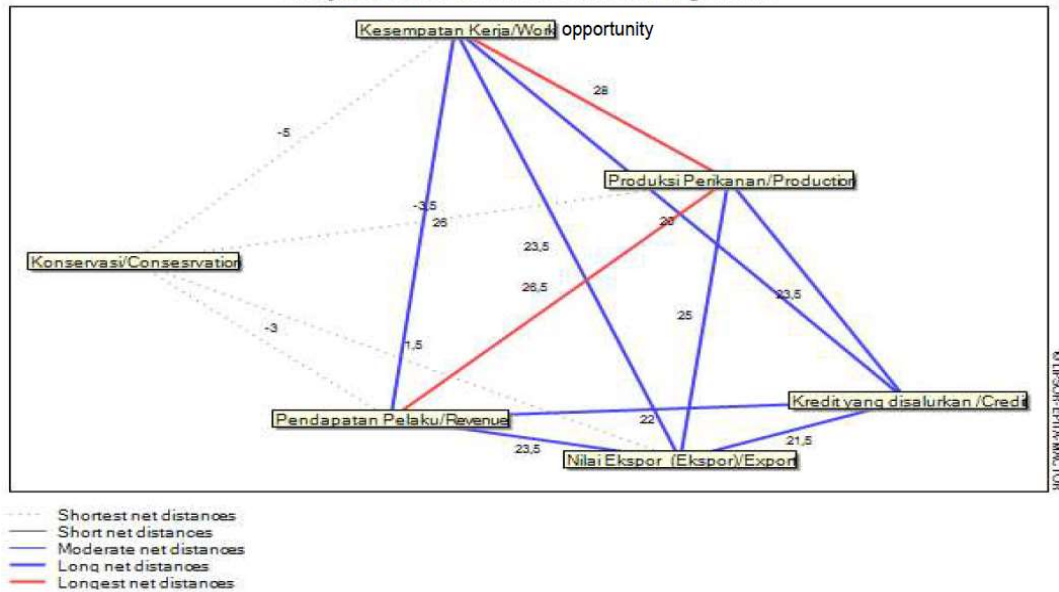


Gambar 6 menunjukkan bahwa tujuan utama untuk pencapaian tujuan adalah peningkatan produksi dan kesempatan kerja, dengan nilai histogram lebih dari tiga puluh. Di sisi lain, pencapaian tujuan konservasi harus memiliki nilai lebih dari tiga puluh, meskipun ada beberapa orang yang tidak setuju dengan tujuan konservasi yang ditunjukkan pada Gambar biru. Gambaran posisi masing-masing disajikan oleh matriks posisi yang dinilai berat (3MAO).

Aktor yang terlibat dalam setiap tujuan. Ini mempertimbangkan pendapatnya tentang setiap tujuan, hierarki objektifnya, dan persaingan antara pelaku. Sebagian besar pelaku usaha, seperti nelayan, pengolahan, penyedia es, perindo, penyedia BBM, dan penyedia perbekalan, memiliki karakteristik yang bertentangan dengan tujuan koneksi. Ini karena tujuan utama para pelaku adalah untuk maksimasi keuntungan, sehingga mereka tidak akan setuju dengan elemen yang berkaitan dengan tujuan konservasi. Persaingan perikanan tangkap, tekanan pembeli, dan kekurangan infrastruktur terus menghambat persaingan perikanan di Kabupaten Purworejo.

Nilai total ketidaksetujuan atau ketidaksepakatan sebesar -18,7 menunjukkan ketidaksetujuan terhadap tujuan konservasi. Histogram yang menunjukkan posisi masing-masing aktor pada setiap tujuan dapat digunakan untuk membuat matriks 3MAO. Ini mempertimbangkan pendapatnya tentang setiap tujuan, hierarki objektifnya, dan persaingan antara pelaku.

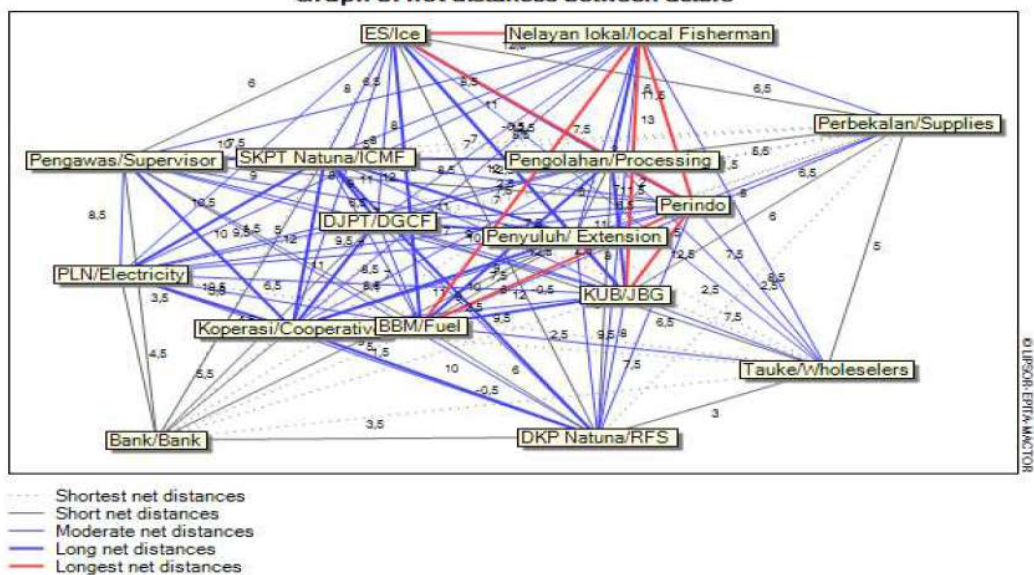
Gambar 7. Grafik Jarak dengan Tujuan
Graph of net distances between objectives



Grafik jarak antar tujuan Para aktor mengambil posisi yang sama—baik pro atau kontra—dalam Gambar 7. Nilai skala, yang merupakan perbedaan antara nilai matriks konvergensi dan divergensi, digambarkan pada grafik ini.

Grafik jarak antar tujuan menunjukkan hubungan antara tujuan program. Warna merah dan biru menunjukkan kemungkinan tingkat keeratan yang terjadi antar tujuan. Warna merah menunjukkan tingkat keterkaitan yang lebih kuat daripada warna biru (Gambar 8). Dalam program pembangunan perikanan Kabupaten Natuna, ada korelasi kuat antara tujuan produksi, tenaga kerja, dan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara tujuan pengembangan sektor perikanan dan pembangunan wilayah di Kabupaten Purworejo.

Gambar 8. Grafik Jarak antar Aktor
Graph of net distances between actors



Jarak yang ada antara aktor menunjukkan seberapa mungkin mereka bekerja sama. Warna merah dan biru menunjukkan tingkat kerjasama yang mungkin, dengan warna merah menunjukkan jarak yang lebih besar. Di Program pembangunan perikanan Kabupaten Natuna, ada hubungan yang kuat antara nelayan, KUB, perindo, penyedia es, dan penyedia BBM. Ini menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan sektor perikanan sangat terkait satu sama lain selama pembangunan daerah atau wilayah di Kabupaten Purworejo.

Selama ini, Tauke dan pedagang besar telah berperan penting dalam bisnis perikanan, tetapi peran mereka telah dikurangi dengan munculnya jaringan baru ini. Perindo, suatu perusahaan milik pemerintah, memiliki kemampuan untuk menggerakkan hubungan antar stakeholder (nelayan, KUB, penyedia es, dan penyedia BBM) menjadi suatu sistem bisnis yang lebih diterima oleh para pelaku. Hubungan ini dapat menghasilkan pemerataan manfaat yang lebih baik. Dengan membangun jaringan yang lebih kuat dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan di Purworejo (seperti Nelayan_KUB_Perindo), peran utama Tauke (pedagang) dapat dikurangi. Karena kehadiran Perindo di pasar, nelayan dan KUB memiliki pilihan lain untuk jaringan pasar produk hasil tangkapan. Perindo dapat menarik nelayan dan KUB untuk bekerja sama dengannya karena kemampuan finansial mereka.

KESIMPULAN

Peran aktor dan pemangku kepentingan dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Purworejo dikategorikan berdasarkan tingkat pengaruh dan ketergantungan mereka. Aktor atau pemangku kepentingan yang berada di kuadran I atau Kiri Atas dan memiliki peran dan pengaruh yang tinggi tetapi tidak tergantung pada mereka adalah sebagai berikut: pedagang (tauke), keduanya penyedia barang dan nelayan. Aktor tersebut bertanggung jawab atas bisnis perikanan di Kabupaten Purworejo. Aktor kuadran II memiliki pengaruh dan ketergantungan yang tinggi. Untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan pengaruh mereka terhadap pembangunan sektor perikanan, berbagai pihak yang bertanggung jawab termasuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan Penyedia BBM. Perhatian diperlukan untuk meningkatkan pengaruh dan ketergantungan pihak yang memiliki pengaruh rendah dan ketergantungan tinggi.

Rekomendasi Kebijakan

Metode analisis Mactor dapat memberikan saran kebijakan tentang pengaruh dan ketergantungan aktor. Strategi dapat digunakan untuk meningkatkan peran aktor atau pemangku kepentingan. Ini terutama berlaku untuk pemangku kepentingan di kuadran II (DJPT, Pengawas, DKP Purworejo, KUB, Perindo, BBM); kuadran III (Pengolahan, penyuluh, SKPT Purworejo) dan kuadran IV (perbankan, koperasi, penyedia es, dan PLN). Dengan mendorong tindakan atau operasi terhadap aktor yang memiliki ketergantungan tinggi dan pengaruh rendah, program-program ini dapat dilaksanakan dengan mudah dan mencapai hasil yang lebih optimal.

Semua pihak berkomitmen untuk mendukung tujuan ekonomi pembangunan perikanan di Kabupaten Purworejo, yang mencakup peningkatan produksi, pendapatan, kesempatan kerja, ekspor, dan peningkatan pinjaman dan kredit. Namun, para pelaku usaha (tauke, pedagang, penyedia es, pengolahan, KUB, Perindo, penyedia BBM, dan perbekalan) tidak setuju dengan tujuan tersebut, sehingga peran pemerintah (DJPT, Pengawasan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo) diperlukan

DAFTAR PUSTAKA

- ADI., Hasana, S. Assidiq, FM. 2023. *Implementasi Konsep Blue Economy Di Indonesia Dengan Memanfaatkan Teknologi Big Data*. *Sensistek*, 6 (2): 134-140.
- A.M. and Wini-Simeon, L., 2018. *Towards defining the Blue Economy: Practical lessons from pacific ocean governance*. *Marine Policy*, 88: 333-341.
- A.M., Moreno-Báez, Swartz, W. and Zheng, C.W., 2021. *Enabling conditions for an equitable and sustainable blue economy*. *Nature*, 591 (7850): 396-401
- Fauzi, A. (2022). *Teknik Analisis Keberlanjutan*. PT. Gramedia Pusaka Utama. Jakarta
- Godet, M. (1991). *Actors Moves and Strategies The Mactor Method : An Air Transport Case Study*, Futures. Butterworth-Heinemann Ltd.
- RA., Yudhyo, Sianturi, RL., Triyana, N. 2023. *Strategi Pengembangan Blue Economy Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau*. *Neo Respublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 4 (1): 166-177.
- Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2019). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Cresspent Press dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Swastanto, Y. & Said, B.D. (2019). *Fishery Resources Management In The Republic Of Indonesia's Fishery Management Region 711 For The Sustainable Fishery Resources Control*. *Jurnal Pertahanan*. 5(1). pp.19-33.